

## EFEKTIVITAS PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19

Zhahwa Syasyabila<sup>1</sup>, Erna Sari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email: [zhahwasyasyabila@gmail.com](mailto:zhahwasyasyabila@gmail.com)<sup>1</sup>, [ernasari1706@gmail.com](mailto:ernasari1706@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas efektivitas program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai pelaksanaan program SGD ke-8 terhadap perekonomian dengan fokus pada analisis tingkat pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), konsumsi masyarakat, dan pengeluaran pemerintah. Tujuan penelitian adalah untuk memahami hubungan antara program PEN terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi di Indonesia. Metode forecasting dengan Microsoft Excel digunakan untuk menganalisis data 10 tahun terakhir untuk memprediksi keakuratan pelaksanaan program PEN pasca pandemi terhadap perekonomian dari tahun ke tahun. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam menghadapi tantangan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

**Kata Kunci:** PEN, SGD, dan Kesejahteraan

### Abstract

*This research discusses the effectiveness of the national economic recovery program (PEN) as the implementation of the 8th SGD program on the economy with a focus on analyzing the unemployment rate, Gross Regional Domestic Product (GRDP), public consumption and government spending. The aim of the research is to understand the relationship between the PEN program on community welfare and economic sustainability in Indonesia. The forecasting method using Microsoft Excel is used to analyze data for the last 10 years to predict the accuracy of the implementation of the post-pandemic PEN program on the economy from year to year. It is hoped that the research results will provide deeper insight into facing the economic challenges caused by the COVID-19 pandemic.*

**Keywords:** PEN, SGD, and Welfare

### PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 di Indonesia telah berdampak pada perekonomian serta kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang cukup dalam akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai bentuk respon kebijakan *lockdown* yang diterapkan di negara lain untuk menekan penyebaran virus yang lebih luas. Sektor ekonomi berdampak pada berbagai

aktivitas berbagai macam usaha di sektor swasta maupun milik negara. DKI Jakarta, sebagai kota metropolitan dan pusat perekonomian nasional dibidang industri dan jasa. Ketika Jabodetabek terkena wabah ini, imbasnya berbagai aktivitas publik banyak dihentikan<sup>1</sup>.

Sejak diterapkannya PSBB yang sebelumnya telah disetujui Kementerian Kesehatan mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Wakil

<sup>1</sup>Muryono, S. (2020). Menyadari dampak ekonomi imbas PSBB. Antara News.

<https://www.antaraneews.com/berita/1750793/menyadari-dampak-ekonomi-imbaspbb>

Ketua Umum Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan saat itu berpendapat bahwa masyarakat kecil sangat berdampak pada kebijakan ini karena 70% perekonomian berpusat di Jakarta. Penerapan PSBB mengharuskan para pengusaha dan perusahaan untuk menutup usahanya. Beberapa karyawan tidak sedikit yang harus dirumahkan untuk bekerja melalui jarak jauh atau dikenal dengan *Work From Home* (WFH). Kerugian yang ditimbulkan para perusahaan pun sangat besar karena ketidakpastian pandemi saat itu. Terkait stok bahan pangan dan logistik masih terus berjalan untuk menunjang kebutuhan primer dan aktivitas di masyarakat<sup>2</sup>.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07%. Penurunan ini adalah krisis ekonomi terburuk sejak tahun 1998. Selain itu lonjakan angka pengangguran yang dilaporkan Kementerian Ketenagakerjaan sekitar 2,56 juta orang kehilangan pekerjaan pada kuartal kedua tahun 2020. Pada triwulan I, ekonomi Indonesia tumbuh 2,97% turun dibandingkan tahun sebelumnya akibat awal pandemi. Meskipun mengalami kontraksi ekonomi, Indonesia masih cukup lebih baik dibandingkan negara seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Inggris. Prediksi resesi global dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia pada 2020 menunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami resesi ringan dengan kontraksi ekonomi sekitar -3% hingga 0%. Masyarakat dan pelaku usaha, termasuk UMKM, juga berperan penting dalam pemulihan ekonomi. Pemerintah memberikan berbagai stimulus fiskal dan moneter untuk mendukung usaha mereka. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional mencakup

peningkatan konsumsi dalam negeri, aktivitas dunia usaha, serta stabilisasi ekonomi dan ekspansi moneter. Pemerintah mengalokasikan Rp 695,2 triliun untuk pemulihan ekonomi, dengan harapan pertumbuhan ekonomi mulai terasa pada triwulan III dan bertumbuh positif pada triwulan IV tahun 2020<sup>3</sup>.

Kepala Disnakertrans (Daerah Istimewa Yogyakarta) DIY melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional pada tahun 2020 mencapai 7,0%, sementara di DIY sebesar 4%. Disnakertrans DIY mengimplementasikan berbagai program pelatihan keterampilan bagi lulusan vokasi dan SMK untuk mempersiapkan mereka berwirausaha atau masuk sektor formal dengan sertifikasi yang diperlukan. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) juga diluncurkan untuk mendukung pekerja yang di PHK dalam memulai usaha mandiri dengan bantuan peralatan dan pelatihan. Penggunaan anggaran untuk pemulihan ekonomi dan menyiapkan masyarakat menghadapi gelombang PHK dengan mendorong partisipasi dalam program kartu pra kerja dan pelatihan soft skill. Pemerintah berfokus pada pendampingan dan pengembangan keterampilan masyarakat untuk memitigasi dampak ekonomi dari pandemi<sup>4</sup>.

Tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah menyeimbangkan proses pembangunan dengan berfokus pada apa yang disebut dengan *Triple E (Economy, Equality, and Ecology)*. Masyarakat global saat ini sudah mulai lebih memperhatikan perlunya keseimbangan dalam hal tersebut. Tindakan yang sebelumnya telah dilakukan tidak tepat dalam pembangunan, maka kehidupan manusia akan punah. Paradigma yang direpresentasikan SDGs sebagai revisi dari paradigma Millennium

<sup>2</sup> Pengusaha Khawatir PSBB Akibatkan PHK Besar-besaran. (2020). CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200407121239-92-491139/pengusaha-khawatir-psbb-akibatkan-phk-besar-besaran>

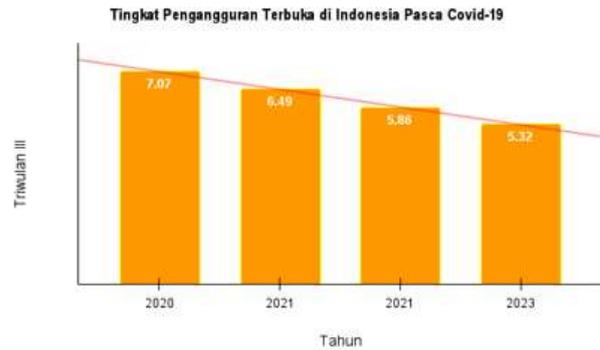
<sup>3</sup> Habibi, M., & Pratama, D. A. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Capaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of*

*Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 68–80. <https://doi.org/10.54144/govsci.v2i2.15>

<sup>4</sup> Mengatasi Pengangguran Dampak Covid-19. (2021). *E-Parlemen DPRD DIY*. <https://www.dprd-diy.go.id/mengatasi-pengangguran-dampak-covid-19/>

Development Goals (MDGs)<sup>5</sup>. Pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke-8 yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Pandemi telah memperburuk kondisi ketenagakerjaan dan menghambat upaya pencapaian target-target SDGs, termasuk pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah berupaya mengatasi dampak negatif tersebut.

PEN dirancang sebagai langkah strategis untuk memulihkan perekonomian nasional dan daerah dari resesi pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat terdampak, serta mendorong pemulihan ekonomi secara nasional. Melalui berbagai program penanggulangan yang mencakup perlindungan sosial, stimulus konsumsi, pemulihan sektor UMKM, hingga dukungan sektor-sektor strategis lainnya, PEN diharapkan dapat memberikan dorongan bagi perekonomian Indonesia<sup>6</sup>. Implementasi program PEN diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa langkah konkret yang telah diambil termasuk pemberian bantuan langsung tunai, subsidi upah bagi pekerja, serta penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pengembangan infrastruktur dan digitalisasi ekonomi sebagai strategi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif.



Grafik 1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Pasca COVID-19

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Data yang dilaporkan BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Pasca COVID-19 menunjukkan penurunan tren. Walaupun terjadi PHK besar-besaran di berbagai daerah masih bisa diimbangi dengan program bantuan seperti premi asuransi BPJS, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Bansos Tunai, Sembako, serta dukungan tidak langsung seperti diskon tarif listrik, Kartu Pra Kerja, dan Penanaman Modal Negara (PMN). Bantuan ini diharapkan mampu melindungi perekonomian nasional dan menyokong pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat SDGs ke-8.

### Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana Perkembangan Program PEN di Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana Kesejahteraan masyarakat sejak ada program PEN.
3. Mengetahui bagaimana peramalan terhadap efektivitas perekonomian nasional dari sebelum adanya program PEN dan sesudah.

### TINJAUAN TEORI

Pada penelitian Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi

<sup>5</sup> Sasongko, D. (2020). Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). *Artikel DJKN*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>

<sup>6</sup> Keuangan, A. D. P. D. dan S. R. D. B. K. E. M. dan. (2021). Dampak Program PEN terhadap Perekonomian Nasional. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*.

COVID-19. WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi (2021) oleh Hanifa, N., & Fisabilillah, L. W. P. Teori distribusi kesejahteraan sangat relevan dalam konteks pandemi COVID-19, khususnya mengenai peran pemerintah dalam pemerataan kesejahteraan di tengah krisis ekonomi saat ini. Dalam teorinya, Richard A. Musgrave dalam Teori Distribusi Kesejahteraan (Welfare Distribution Theory) menyatakan bahwa peran negara adalah untuk mendorong efisiensi dan pemerataan dalam distribusi sumber daya dengan menggunakan instrumen pajak, jaminan sosial, dan layanan publik untuk mempengaruhi distribusi pendapatan sebuah keseimbangan. Selama pandemi, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan belanja pemerintah dan memberikan subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga dan menjamin kecukupan pasokan barang-barang kebutuhan pokok, yang merupakan langkah penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini mencakup peran serta pelaku usaha untuk menjamin pasokan bahan baku pangan. Selain itu, kebijakan subsidi dan insentif pajak akan diberikan untuk mendukung pelaku ekonomi yang terkena dampak, seperti sektor pariwisata, untuk mengurangi dampak negatif pandemi ini. Meskipun banyak langkah telah diambil, efektivitasnya masih menjadi tantangan besar, karena permasalahan keadilan dalam distribusi pendapatan masih kompleks dan bergantung pada pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri.

Selanjutnya Purnomoratih (2021) dalam penelitiannya berjudul Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Menopang Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Selatan pada Jurnal Manajemen

Perbendaharaan. Pada saat pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mencanangkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk melindungi, menjaga, dan meningkatkan kinerja perekonomian negara. Pelaksanaan program ini diawali dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional, yang dilanjutkan dengan berbagai program dukungan yang dikelompokkan dalam beberapa klaster: Contoh: Klaster Kesehatan, Klaster Perlindungan Sosial, Klaster Penunjang UMKM dan Bisnis, dll. Pelaksanaan program PEN dimulai pada bulan Maret 2020 dengan pembayaran tunjangan kepada tenaga kesehatan, dan berbagai program pendukung lainnya juga terus berlanjut. Alokasi anggaran tiap klaster ditetapkan dengan berbagai peraturan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2020. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program PEN dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan PDB di berbagai daerah seperti Kalimantan Selatan, program PEN berhasil menekan angka pengangguran.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sari, M., Fakhrurozi, M., & Ruslaini. (2024). tentang Insentif Pajak UMKM: Efektivitas Dan Hambatan dalam Jurnal Kalianda Halok Gagas. Tinjauan terhadap efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa program tersebut dirancang untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi tersebut. PEN fokus melindungi, menjaga, dan meningkatkan kinerja perekonomian berbagai sektor, terutama sektor yang paling terdampak. Program tersebut mencakup berbagai inisiatif, termasuk pemeriksaan stimulus, keringanan pajak, dan bantuan sosial, serta pemberian pelatihan dan program padat karya untuk mengurangi pengangguran. Kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa program PEN berhasil menekan peningkatan pengangguran dan

mendukung produk domestik bruto (PDRB) di beberapa daerah seperti Kalimantan Selatan. Misalnya, pengukuran menunjukkan bahwa program PEN efektif mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan pada tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan PDRB dan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dibandingkan prediksi tanpa program PEN. Efektivitas program PEN juga terlihat dari upaya pemerintah memberikan jaring pengaman sosial seperti manfaat pajak penghasilan, bunga pinjaman yang rendah, dan kartu pra kerja bagi korban PHK. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjamin kelangsungan usaha kecil di masa pandemi.

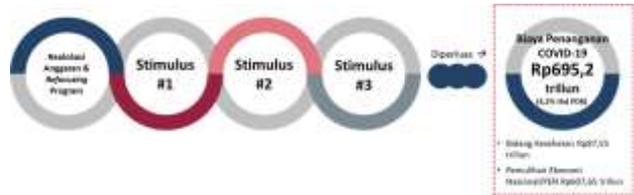
**METODE PENELITIAN**

Kajian Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Pasca COVID-19 ini menggunakan metode deskriptif studi literatur dan kuantitatif dengan forecasting sederhana. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi literatur penelitian sebelumnya dan penelitian sekunder dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS dan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan hasil kajian fiskal dan moneter. Pengukuran tingkat efektivitas program PEN menggunakan data PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Konsumsi Masyarakat, dan Pengeluaran Pemerintah. Data prognosis PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Konsumsi Masyarakat, dan Pengeluaran Pemerintah menjadi variabel untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dalam kondisi tanpa diimplementasikannya program PEN.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang diluncurkan sebagai respons terhadap dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Program

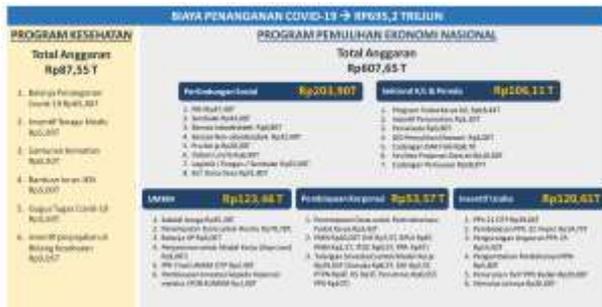
ini dirancang untuk membantu memulihkan perekonomian nasional yang terkena dampak signifikan dari pandemi, serta untuk mendukung sektor-sektor yang paling terdampak.



Gambar 1. Perkembangan Langkah Kebijakan Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

*Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia*

Stimulus penanganan COVID-19 memiliki dua aspek utama. Yang pertama adalah menangani krisis kesehatan sebagai faktor utama yang menyebabkan krisis dan yang kedua adalah menangani krisis ekonomi sebagai konsekuensi domino dari krisis kesehatan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui program ini, pemerintah berusaha menggabungkan berbagai tindakan untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap ekonomi, baik di tingkat individu maupun rumah tangga hingga perusahaan. Untuk merespon dampak negatif ini, diterapkan kebijakan yang luar biasa dan bahkan belum pernah dilakukan sebelumnya. Secara keseluruhan, ada enam kebijakan utama program PEN. Mereka adalah penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk usaha kecil dan menengah, pembiayaan korporasi, dan program sektoral dari lembaga dan pemerintah daerah di seluruh negara.



Gambar 2. Program Kebijakan Yang Komprehensif & Terkoordinasi Untuk Menyelamatkan Jiwa Dan Perekonomian Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Anggaran yang dikeluarkan ini sangatlah besar sehingga mendorong pemangku kepentingan untuk membagi biaya dan risiko sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan Program PEN dimulai pada tahun 2020. Ini dimulai dengan memberikan tunjangan kepada tenaga kesehatan dan kemudian diikuti dengan berbagai program bantuan yang terorganisir dalam berbagai klaster. Untuk sektor kesehatan dalam program PEN, Stimulus yang dialokasikan dialokasikan sebesar Rp 87,55 triliun. Di dalamnya, terdapat anggaran untuk insentif kepada tenaga kesehatan yang merupakan pilar utama dalam memerangi COVID-19. Insentif senilai Rp 5,9 triliun telah diberikan dan juga telah disiapkan santunan untuk tenaga kesehatan yang meninggal saat berjuang melawan virus tersebut. Di samping itu, pemerintah memberikan perlindungan kepada 30 juta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU) dan Bukan Pekerja (BP) melalui premi asuransi BPJS. Ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kelompok ekonomi yang rentan. Pada tahun 2020, jumlah SDM Kesehatan di Indonesia sebanyak 1.463.452 orang, terdiri dari 1.072.679 orang tenaga

kesehatan (73,30%) dan 390.773 orang tenaga penunjang kesehatan (26,70%). Proporsi tenaga keperawatan sebesar 40,85 persen dari total tenaga kesehatan, sedangkan proporsi tenaga kesehatan tradisional sebesar 0,03% dari total tenaga kesehatan<sup>7</sup>.

Berikutnya di sektor perlindungan nasional, terdapat jutaan orang bekerja di bidang berpenghasilan rendah yang membutuhkan bantuan sosial. Mereka termasuk petani, pedagang, buruh bangunan, buruh pabrik, supir, nelayan, dan lainnya. Anggaran sebesar Rp 203,9 triliun dialokasikan untuk dukungan baik, yang mencakup intervensi langsung seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Bansos Tunai, dan Sembako, serta dukungan tidak langsung seperti diskon tarif listrik dan Kartu Pra Kerja. Sebagian besar program perlindungan sosial PEN adalah pengembangan dari program yang sudah ada. Selama ini, melalui berbagai program jaring pengaman sosial, kesejahteraan jutaan masyarakat di lapisan bawah terus diperhatikan. Upaya tersebut semakin diperkuat di tengah pandemi. Sebagai contoh, indeks bantuan per komponen program PKH naik 25%, sementara program Kartu Sembako mengalokasikan lebih banyak uang untuk memberikan bantuan senilai Rp200 ribu setiap bulan kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 12 bulan. Selain itu, program Kartu Pra-Kerja diperbarui untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja. Selain kebijakan yang sudah ada, ada berbagai bentuk dukungan untuk mempertahankan daya beli, seperti diskon tarif listrik, BLT Dana Desa, Bansos Tunai Non Jabodetabek, dan Bansos Sembako Jabodetabek<sup>8</sup>.

Di sektor dukungan UMKM, total dukungan yang diberikan dalam program PEN

<sup>7</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (2021). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020. Bab III SDM Kesehatan. Hlm 51-53.

<sup>8</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

<https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>

mencapai Rp 123,46 triliun melalui berbagai pilar seperti insentif pajak yang ditanggung pemerintah atas PPh final UMKM dan kelonggaran pembayaran angsuran dan bunga kredit. Program Subsidi Bunga Ultra Mikro dan UMKM juga memberikan UMKM fasilitas penundaan sementara pembayaran angsuran/cicilan pokok serta subsidi pembayaran bunga kredit. Sekitar 53,4 juta rekening terdaftar dalam program ini. Dengan subsidi bunga sebesar Rp 35,28 triliun, total penundaan cicilan pokok mencapai Rp 285,09 triliun menurut estimasi yang dilakukan. Selain itu, pemerintah daerah ikut serta dalam program PEN, seperti dengan memberikan tambahan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 5 triliun dan DAK Fisik sebesar Rp8,7 triliun untuk mendorong pembangunan fisik yang dapat menyerap tenaga kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan dilakukan secara swakelola. Selain itu, pemerintah juga menawarkan alternatif pendanaan bagi pemerintah daerah dalam bentuk pinjaman daerah sebesar Rp 10 triliun yang memungkinkan pembangunan fisik.

Mengutip dari Kementerian Keuangan, pemerintah juga berusaha membantu korporasi yang terkena dampak pandemi, terutama perusahaan padat karya. Total dukungan untuk pembiayaan korporasi di tengah pandemi dan pemulihan ekonomi mencapai Rp 53,57 triliun. Dengan skema penempatan dana pemerintah, perusahaan padat karya dapat menerima fasilitas restrukturisasi. Beberapa BUMN memerlukan tindakan segera karena jenis bisnisnya telah terpengaruh langsung oleh pandemi seperti PT Perusahaan Listrik Negara, PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, Pertamina, dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Total program PEN yang disalurkan melalui BUMN sebesar Rp 20,5 triliun dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) dan talangan investasi untuk modal kerja mencapai Rp 29,65 triliun.

Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak usaha yang gulung tikar dan

meningkatkan jumlah pengangguran, sehingga pemerintah berupaya mendorong para pelaku usaha yang terdampak melalui insentif usaha. Ditetapkan anggaran sebesar Rp 120,61 triliun untuk insentif perpajakan dunia usaha sebagai upaya mendorong dari sisi penawaran. Berdasarkan pernyataan Kementerian Keuangan, insentif perpajakan dalam stimulus COVID-19 beragam seperti PPh pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP), Pembebasan PPh pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, serta pengembalian pendahuluan PPN. Selain berbagai langkah temporer, tarif PPh Badan juga diturunkan dari 25% menjadi 22%, sebagaimana tertuang dalam PERPPU nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU nomor 2 tahun 2020.

Tabel 1. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2020 (dalam triliun rupiah)

Uraian	Target APBN	Jan - Sep 2020	% thd Target
Pajak Penghasilan	670,38	441,79	65,90
Non Migas	638,52	418,16	65,49
Migas	31,86	23,63	74,17
PPN & PPhBM	507,52	290,33	57,21
PBB dan Pajak Lainnya	20,93	18,50	88,39
<b>Jumlah</b>	<b>1.198,82</b>	<b>750,62</b>	<b>62,61</b>

Keterangan: Target APBN berdasarkan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2020

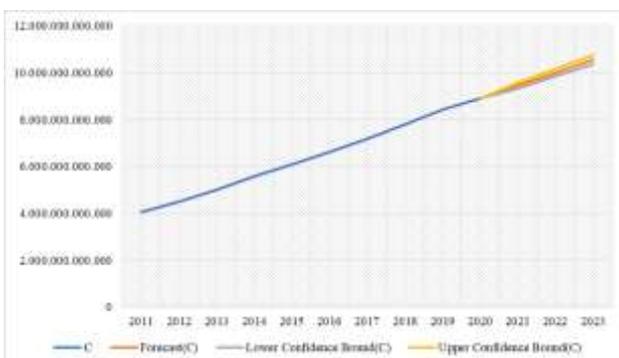
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pandemi COVID-19 mempengaruhi penerimaan pajak negara. Dapat dilihat di tahun masuknya pandemi COVID-19 ke Indonesia pada 2020, penerimaan pajak nasional tidak mencapai target yang ditetapkan. *Corporate income tax* (Pajak Penghasilan Badan) dan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan oleh pemerintah selama pandemi COVID-19. Pemberian ini sangat penting bagi sektor pajak Indonesia karena diberikan di tengah wabah corona yang kian mengkhawatirkan ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan

penerimaan pajak dan mencegah semua wajib pajak menunggak atau menghindari pajak<sup>9</sup>.

Pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi di Indonesia menghadirkan berbagai dilema kompleks yang harus dihadapi pemerintah. Insentif pajak, seperti pengurangan, pembebasan, atau penundaan pajak, sangat membantu pelaku usaha, terutama UMKM, untuk bertahan selama pandemi. Namun, ini menyebabkan penurunan pendapatan negara saat dana sangat dibutuhkan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Lalu apakah insentif perpajakan usaha dan kebijakan lainnya dalam program PEN ini efektif dalam memulihkan perekonomian Indonesia?

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator dalam melihat pertumbuhan ekonomi. PDB mencakup faktor konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor impor. Untuk mengetahui efektivitas program PEN dalam memulihkan perekonomian nasional, digunakan data series Pengeluaran Konsumsi Masyarakat (C) dan Pengeluaran Pemerintah (G) dengan periode 10 tahun sejak tahun 2011. Dimana dua data tersebut merupakan unsur pembentuk PDB. Saat masa pandemi, pengeluaran konsumsi masyarakat sempat stagnan sebagaimana disajikan dalam grafik berikut:



Grafik 2. Grafik *Forecasting* Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tanpa Program PEN

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat yang ikut terdampak saat pandemi sehingga pemerintah mengatasinya dengan pelaksanaan bantuan subsidi upah, bantuan sosial tunai, dan lainnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengembalikan peredaran kegiatan perekonomian. Indikator pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) penting dalam menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara karena rumah tangga berfungsi sebagai konsumen akhir barang dan jasa, serta sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor lain. Rumah tangga berperan sebagai konsumen akhir karena mereka mengkonsumsi berbagai jenis barang dan jasa, seperti makanan, perumahan, dan lain-lain. Dalam hal ini, rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia.

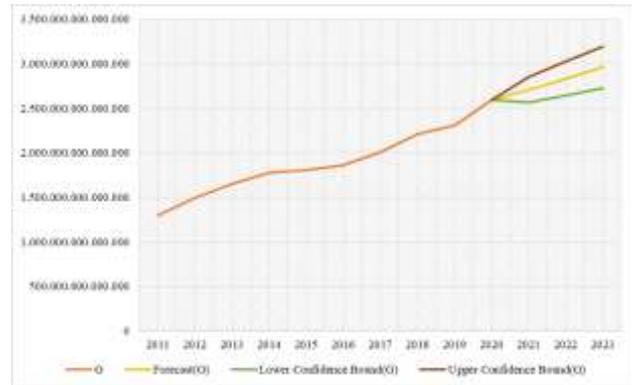
Diramalkan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 mencapai Rp 9,45 triliun, di tahun 2022 sebesar Rp 10 triliun dan tahun 2023 mencapai Rp 10,55 triliun. Realisasinya, capaian pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 lebih rendah Rp219 miliar dari ramalan tersebut. Selisih tersebut tentunya bukan hal yang mengherankan, mengingat sempat berhentinya kegiatan ekonomi sebagai dampak dari kebijakan *lockdown* dan lainnya saat pandemi. Dengan adanya program PEN, konsumsi rumah tangga mampu ditingkatkan bahkan menjadi penopang perekonomian pada tahun nasional pada tahun 2021 dimana porsinya mencapai 54,42% atau lebih dari separuh PDB nasional. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ini merupakan sisi permintaan (*demand side*) dari

<sup>9</sup> Dewi, Syanti et al. (2020). *Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomika dan

Manajemen Vol. 9 No. 2 Oktober 2020 hlm. 108-124.

PDB. Sedangkan, dari sisi penawarannya (*supply side*) yaitu pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek dalam kebijakan fiskal, yang merujuk pada tindakan yang diambil pemerintah untuk mengendalikan ekonomi dengan menetapkan pendapatan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun<sup>10</sup>. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, baik untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau program sosial, hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Investasi dalam infrastruktur, misalnya, tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan efisiensi ekonomi jangka panjang dengan memperbaiki transportasi dan logistik. Pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas. Program sosial dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelompok berpenghasilan rendah, sehingga mendorong konsumsi domestik. Namun, pengeluaran pemerintah yang tidak efisien atau berlebihan dapat menyebabkan defisit anggaran dan peningkatan utang publik, yang dalam jangka panjang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah yang bijaksana dan efisien sangat penting untuk mendukung pertumbuhan PDB secara berkelanjutan.



Grafik 3. Grafik Forecasting Pengeluaran Pemerintah Tanpa Program PEN

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah.

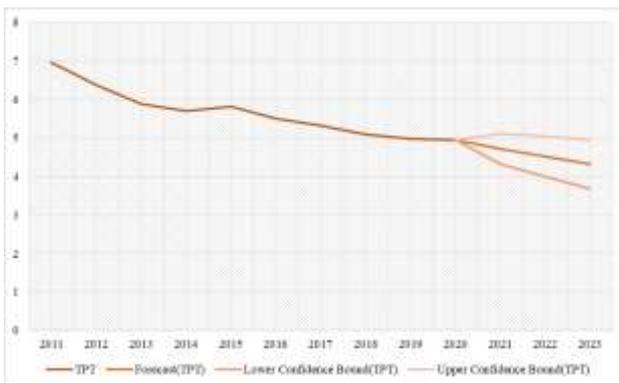
Berdasarkan grafik di atas, diperkirakan pengeluaran pemerintah (G) pada tahun 2021 mencapai Rp2.707,18 triliun dan di tahun 2022 mencapai Rp2.834,55 triliun. Realisasinya, pada tahun 2021 pengeluaran pemerintah mencapai Rp2.786,41 triliun. Terdapat selisih sebesar Rp 79,23 triliun dimana selama pandemi COVID-19, pengeluaran pemerintah Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan untuk menangani dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial yang ditimbulkan oleh krisis tersebut. Pemerintah mengambil berbagai langkah luar biasa untuk menanggulangi pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi. Aspek utama dari pengeluaran pemerintah Indonesia pada tahun 2021 mencakup belanja kesehatan, bantuan sosial, dukungan untuk dunia usaha, dan peningkatan infrastruktur serta program pemulihan ekonomi. Peningkatan anggaran untuk kesehatan terutama ditujukan untuk pengadaan vaksin COVID-19, perawatan pasien, peningkatan kapasitas rumah sakit, dan penyediaan alat kesehatan. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial tunai kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh pandemi, serta memberikan insentif pajak dan bantuan modal kepada pelaku usaha, terutama UMKM. Investasi dalam infrastruktur dan program pemulihan ekonomi

<sup>10</sup> Tamba, Purba & Sihotang. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Dan Penanaman Modal Asing Terhadap

Produk Domestik Bruto Di Indonesia Periode 2000–2020. Jurnal KAFEBIS Vol 01 No 01.

juga menjadi fokus utama, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan mendukung aktivitas ekonomi.

Berkaitan dengan lapangan kerja, pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka nasional. Di Indonesia, pandemi telah menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran terbuka sebagai akibat dari berbagai faktor ekonomi yang dipicu oleh pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan terhadap jumlah orang yang bekerja. TPT dihitung sebagai persentase jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan terhadap jumlah orang yang bekerja.



Grafik 4. Grafik *Forecasting* Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tanpa Program PEN

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah.

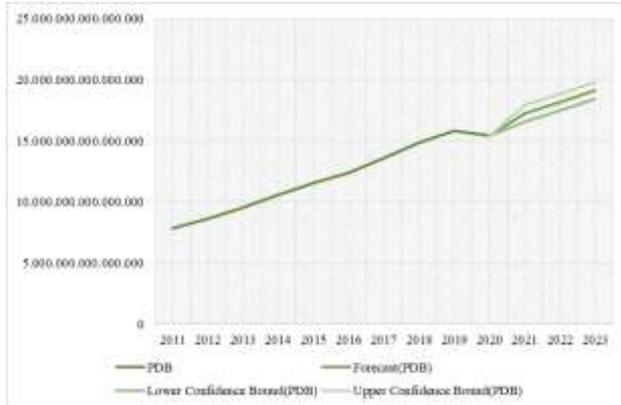
Berdasarkan grafik di atas, diperkirakan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2021 mencapai 4,72% dan pada tahun 2022 mencapai 4.51% dengan catatan jika tidak terdapat pandemi yang menyebabkan terhambatnya perekonomian. Realisasinya, tahun 2021 merupakan waktu krisis perekonomian Indonesia akibat pandemi yang melanda. Sehingga, banyak sektor usaha yang terdampak dan berhenti beroperasi. Dimana tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,26%. Penutupan bisnis, penurunan produksi, dan pengurangan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, seperti pariwisata, perhotelan,

transportasi, dan ritel, menjadi penyebab utama meningkatnya pengangguran. Banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau menunda rekrutmen baru untuk mengatasi penurunan pendapatan dan ketidakpastian ekonomi.

Selain itu, sektor informal juga terdampak berat karena penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, menyebabkan banyak pekerja informal kehilangan mata pencaharian mereka. Selain itu, pelajar dan fresh graduate juga menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan baru akibat kondisi pasar tenaga kerja yang sulit. Dampak pandemi terhadap tingkat pengangguran terbuka nasional tidak hanya menyebabkan masalah ekonomi, tetapi juga dapat berdampak pada kesejahteraan sosial, kesehatan mental, dan stabilitas sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, mitigasi dan kebijakan yang tepat diperlukan untuk membantu menangani peningkatan pengangguran, seperti stimulus ekonomi, program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk penciptaan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang tumbuh selama pandemi. Di tahun 2022, TPT dapat ditekan oleh pemerintah melalui program PEN, sehingga di tahun berikutnya persentase TPT menurun menjadi 5,83%.

Melalui serangkaian kebijakan dan stimulus ekonomi yang dirancang untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, program PEN bertujuan untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan PEN yang diberlakukan pemerintah sejak tahun 2020 dan pembatasan mobilitas yang berakhir pada awal tahun 2021 diperkirakan membawa dampak positif bagi masyarakat. Pembukaan pembatasan tersebut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, yang secara tidak

langsung menghasilkan peningkatan tingkat PDB pada tahun 2021<sup>11</sup>.



Grafik 5. Grafik *Forecasting* Produk Domestik Bruto Tanpa Program PEN

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Databoks by Katadata, data diolah

Diperkirakan pada tahun 2021, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp 17.241,80 triliun. Hal ini tidak sesuai dengan realisasi yang mencapai Rp 16.980 triliun. Selisih Rp 1.000 triliun tentunya menunjukkan tanda tanya besar bagi kemampuan program PEN memulihkan perekonomian. Jika dilihat hanya sampai sini, maka program PEN tidak efektif bagi pemulihan perekonomian di masa pandemi. Tetapi diperkirakan tahun berikutnya yaitu di tahun 2022 dan 2023, PDB akan mencapai Rp 18.182 triliun dan Rp19.123 triliun. Realisasinya, laporan dari Badan Pusat Statistik mengungkap pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB) yang melebihi *forecasting* tersebut. Dimana di tahun 2022, PDB Indonesia berhasil mencapai Rp 19.588 triliun dan di tahun berikutnya yaitu 2023 mencapai Rp 20.892 triliun. Hal ini tentunya merupakan capaian positif, mengingat anggaran yang telah digelontorkan dalam program ini sangat besar dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi krusial dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 karena

pertumbuhan ekonomi yang kuat menjadi kunci utama untuk memulihkan ekonomi yang terdampak.

Melalui PEN, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama karena dampaknya yang mendalam terhadap seluruh sektor ekonomi. Di masa rancangan dan penyusunannya, program ini diharapkan mampu mengimbangi penurunan aktivitas ekonomi selama pandemi dan mengembalikan kepercayaan bisnis serta konsumen dengan menggerakkan sektor ekonomi secara keseluruhan. Lebih lanjut, upaya PEN juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran yang meningkat akibat krisis. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari program PEN diharapkan dapat memicu inovasi dan peningkatan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, memperkuat fondasi ekonomi nasional untuk masa depan.

Realisasinya program ini menghadapi banyak masalah dan hambatan, yang menyebabkan implementasinya kurang efisien dan optimal. Ketersediaan data dan ketepatan sasaran kebijakan menjadi problematika yang dihadapi pemerintah. Seperti contoh, banyak orang miskin baru muncul selama pandemi yang belum diidentifikasi atau dicatat oleh negara sehingga mereka tidak mendapat haknya. Contoh lainnya, pada kebijakan subsidi gaji di bawah 5 juta, melalui subsidi tersebut pemerintah memiliki maksud untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga sehingga dapat meningkatkan konsumsinya. Seperti yang telah dijabarkan pada bagian awal tulisan ini, kontraksi yang terjadi pada konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun pengawasan mengenai penggunaan subsidi tersebut tentu tidak bisa di kontrol dengan baik oleh pemerintah. Mengingat dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi akibat

<sup>11</sup> Widodo, U. P. W., & Ardhiani, M. R. (2022). *Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Owner: Riset

Dan Jurnal Akuntansi, 6(2), 2112-2126. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.833>

pandemi menyebabkan dialihkannya konsumsi pada tabungan, tujuan pemerintah dalam pemberian subsidi ini terkesan keluar dari jalurnya<sup>12</sup>.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah respon pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional yang terdampak pandemi. Penelitian ini memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi ataupun terdampak pada program PEN seperti tingkat pengangguran, kebijakan penanganan COVID-19, realisasi dan target penerimaan pajak, prediksi pengeluaran rumah tangga, prediksi pengeluaran pemerintah yang nantinya mempengaruhi PDB Nasional. Berdasarkan uji peramalan, diperoleh hasil bahwa program PEN melalui kebijakan fiskal dan moneter dapat memberikan dampak positif bagi konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan PDB. Di sisi lain, program PEN diperkirakan masih belum cukup efektif memberikan stimulus positif untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

### Saran

Dalam konteks kajian lain terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terdapat beberapa saran yang dapat diambil untuk pengembangan lebih lanjut. Pertama, perlu dilakukan studi perbandingan lintas negara mengenai program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan selama pandemi dengan pendekatan yang dilakukan di berbagai negara, sehingga dapat menjadi referensi kebijakan. Kedua, menganalisis lebih jauh sifat komprehensif program PEN, dengan memperhatikan dampaknya terhadap kelompok rentan dan marginal. Terakhir, dalam proses evaluasi dan pengembangan kebijakan terkait program PEN. Kolaborasi lintas sektor ini akan memperkaya perspektif, menjamin keberlanjutan

program dan mendorong implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2013). Neraca Rumah Tangga Indonesia Tahun 2011 - 2013.
- BPS. (2015). Neraca Rumah Tangga Indonesia Tahun 2015 - 2017.
- BPS. (2018). Neraca Rumah Tangga Indonesia Tahun 2013 - 2015.
- BPS. (2019). Neraca Rumah Tangga Indonesia Tahun 2017 - 2019.
- Dewi, S., Widyasari, & Natherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* , 9(2), 108–124.
- Habibi, M., & Pratama, D. A. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Capaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 68–80. <https://doi.org/10.54144/govsci.v2i2.15>
- Hanifa, N., & Fisabilillah, L. W. P. (2021). Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 9–19. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2807>
- Kuangan, A. D. P. D. dan S. R. D. B. K. E. M. dan. (2021). Dampak Program PEN terhadap Perekonomian Nasional. *Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*.
- Kusnandar, V. B. (2022). Lebih dari Separuh Perekonomian RI Ditopang Konsumsi Rumah Tangga. *Katadataboks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/16/lebih-dari-separuh-perekonomian-ri-ditopang-konsumsi-rumah-tangga>
- Mengatasi Pengangguran Dampak Covid-19. (2021). *E-Parlemen DPRD DIY*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/biak/id/data-publikasi/artikel/2932-tes.html>

<sup>12</sup> Sri Hariadi. (2020). Keefektivitasan Program PEN Masih Diragukan, Apa Solusinya?.

<https://www.dprd-diy.go.id/mengatasi-pengangguran-dampak-covid-19/>

Muryono, S. (2020). Menyadari dampak ekonomi imbas PSBB. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/1750793/menyadari-dampak-ekonomi-imbaspbb>

Pengusaha Khawatir PSBB Akibatkan PHK Besar-besaran. (2020). *CNN Indoensia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200407121239-92-491139/pengusaha-khawatir-psbb-akibatkan-phk-besar-besaran>

Purnomoratih, Y. (2021). Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Menopang Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Selatan. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.366>

Sari, M., Fakhrurozi, M., & Ruslaini. (2024). Insentif Pajak UMKM: Efektivitas Dan Hambatan. *Jurnal Kalianda Halok Gagas*, 7(1), 56–66. <https://doi.org/10.52655/KHG.V7I1.92>

Sasongko, D. (2020). Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). *Artikel DJKN*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>